

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin,Said, Zainal. 2004. Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa

Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta

Adrian Sutedi. 2014. Hukum Ekspor Impor, Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses

AG. Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi),
Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Arif Satria, 2015, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.

Ateng Syafrudin, 2000. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang
Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas
Parahyangan, Bandung

Budiardjo, Miriam. 1992. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama

Departemen Pendidikan Nasional, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :
Balai Pustaka

Dyah Ochtrina Susanti dan Aan Efendi, 2015. Penelitian Hukum Legal Research,
Jakarta: Sinar Grafika

Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia,
Rangkang Education, Yogyakarta

Fedi, M, A. Sondita, 2011. Manajemen Sumber Daya Perikanan, Modul
Perkuliahan.

Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang
Perikanan, PT Rineka Cipta, Jakarta

Gunawan Setiardja, 1990. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jogjakarta

Hesel Nogi S dan Tangkilisan, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi,
Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offset

Indrohato, 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus
Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*, Prenamedia Group

Marhaeni Ria Simbolo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nana Syaiodih Sukmadinata, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya

Notonagoro, 1984, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Bandung.

Petter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rosady Ruslan, 2003. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers

Rusadi Kantaprawira, 1998. "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta

Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindnesiaan*, CV Utomo, Bandun.

Sri Susyanti Nur, 2010, Hak Guna Laut Dalam Usaha Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Suatu Kajian Hukum Agraria Kelautan), Pustaka Pena Press, Makassar

Stout HD, 2004. *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudirman Saad, 2003, Politik Hukum Perikanan Indonesia, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Red, Bandung: ALfabeta

Suwoto Mulyosudarmo, 1990. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta

Wahyono S.K, 2009, Indonesia Negara Maritim, Jakarta: Teraju

Wayne Parson, 2005. Public Policy, (akarta : Prenada Media

William N. Dunn, 1999. Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta : Hanindita Graha
Widya

JURNAL

Dirhamsyah, 2007, Penegakan Hukum Laut di Indonesia, Jurnal Oseana Volume
XXXII Nomor 1 Tahun 2017.

Erlania, et.al., 2016. “Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk
Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok”,
(Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia JKPI: Vol. 8 No. 2, November
2016.

Hengky K. Baransano dan Jubhar C. Mangimbulude, 2010, Eksploitasi dan
Konservasi Sumber daya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia, Jurnal
Biologi Papua Volume 3 Nomor 1

INTERNET

Deni Muliya, “Dituding Kebijakan Ekspor Benih Lobster Sembunyi di Balik
Pandemi Covid-19, Ini Kata Edhy Prabowo”, KompasTV, 2020,
<https://www.kompas.tv/article/91829/dituding-kebijakan-ekspor-benih-lobster-sembunyi-di-balik-pandemi-covid-19-ini-kata-edhy-prabowo>

Fanesa Fargomeli, 2014, Iinteraksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur, Jurnal Acta Diurna Volume III. No. 3 Tahun 2014

Gusman, Hanif. “Wacana Ekspor Benih Lobster: Bagaimana Kondisi Lobster di RI”, Tirto, 2020, <https://tirto.id/wacana-ekspor-benih-lobster-bagaimana-kondisi-lobster-di-ri-eqXN>.

Idris, Muhammad. “Apa Alasan Edhy Prabowo Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi?”, Kompas, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/07/05/063501826/apa-alasan-edhy-prabowocabut-larangan-ekspor-benih-lobster-era-susi?page=all>, diakses tanggal 29 Juli 2020.

Kumparan, “Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Bisa Bantu Nelayan Terdampak COVID-19”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-edhy-sebut-ekspor-benih-lobster-bisa-bantu-nelayan-terdampak-covid-19-1tfXk5taQtf/full>

Medcom.id, “Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional”, Antara, 2020, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaan-lobster-nasional>.

Yose Rizal Damuri dan Fajar B. Hirawan, “Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020”, CSIS, 2020, <https://www.csis.or.id/publications/mengukur-dampak-covid-19-pada-pertumbuhan-ekonomi-dan-perdagangan-indonesia-2020>.

UU

Kementerian Kelautan dan Perikanan (a), KP Republik Indonesia tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, PermenKP No. 12 Tahun 2020, LN No. 454 Tahun 2020, Konsiderans huruf a.

Pasal 6 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pasal 1 KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, 2006. Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes. ECO : Natural Society.

UU Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118) Jo.

UU Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154) Tentang Perikanan

UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019
Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

